

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan kerja secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi permasalahan utama. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini berawal dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disalah satu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pihak lain.

Pembangunan ekonomi yang bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga kestabilan harga dengan memperhatikan tingkat inflasi, mengentaskan kemiskinan, menjaga keseimbangan pembayaran, pendistribusian pendapatan yang adil dan merata serta mengatasi masalah pengangguran. Maka dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, negara meluncurkan berbagai kebijakan misalnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan non moneter dan sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Jika

pengangguran tidak segera diatasi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan sosial serta berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius. Lebih prihatin lagi di beberapa negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja semakin bertambah tinggi (Sukirno, 1985).

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas agar mampu meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Kemakmuran tersebut dapat dilihat dari indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi yaitu : 1) Pendapatan Nasional, 2) Penggunaan Tenaga kerja dan pengangguran, 3) Tingkat Inflasi dan 4) Neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Sukirno, 2001).

Pengangguran yang terselubung di daerah pedesaan dan perkotaan merupakan sebagian akibat dari kurangnya tersedianya lapangan pekerjaan yang produktif penuh. Indonesia masih dihadapan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi karena adanya indikator bahwa

tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh (Boediono, 1993).

Akibat adanya pengangguran, banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan. Keadaan tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia hidup dengan kondisi miskin dan melarat. Dampak selanjutnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, prostitusi, meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan, putus sekolah, anak jalanan dan lain-lain. Berbagai masalah sosial tersebut merupakan penyakit masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, moralitas dan merendahkan martabat manusia.

Masalah pengangguran memang selalu menjadi persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya berakibat bertambahnya pula angkatan kerja dan tentunya memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan semakin meningkat, seiring dengan demikian maka jumlah tenaga kerja juga akan meningkat.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. BPS mendefinisikan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sedang bekerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penduduk usia kerja tersebut terbagi dalam angkatan kerja yang mencakup bekerja dan mencari kerja serta bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga.

Berikut ini disajikan data tentang angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut wilayah dan jenis kelamin periode Februari 2013-Agustus 2015.

**TABEL 1. 1**

Angka Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Periode Februari 2013-Agustus 2015

<b>Tahun</b>		<b>Nasional</b>	<b>DIY</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Desa</b>	<b>Kota</b>
2013	Februari	5,29 %	3,73%	4,37%	3,22%	2,47%	4,45%
	Agustus	6,25%	3,24%	2,81%	3,59%	2,04%	3,93%
2014	Februari	5,7%	2,16%	1,6%	2,67%	1,24%	2,68%
	Agustus	5,9%	3,33%	2,65%	3,88%	2,17%	4%
2015	Februari	5,8%	4,07%	2,59%	5,23%	0,95%	5,3%
	Agustus	6,1%	4,07%	2,53%	3,89%	1,74%	5,2%

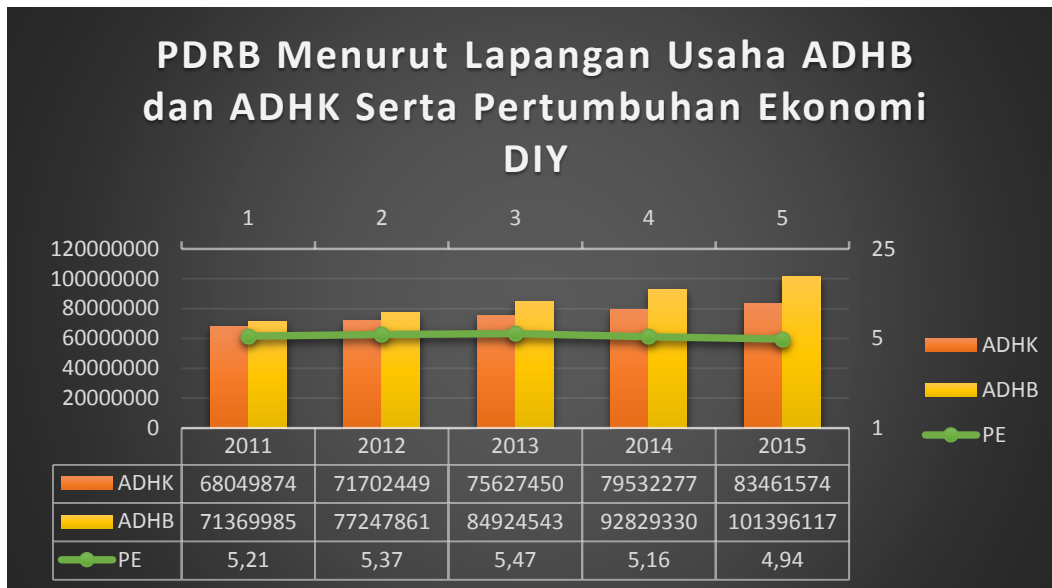
*Sumber : BPS D.I. Yogyakarta Februari 2012-Agustus 2015*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Februari 2013-Agustus 2015 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan Agustus 2015 sebesar 5,2 persen, jika dibandingkan dengan Agustus 2014 sebesar 4 persen mengalami penurunan 1,2 poin hal tersebut dipengaruhi karena beragamnya lapangan pekerjaan serta meningkatnya pusat perekonomian sehingga angkatan kerja baru lebih cenderung mencari pekerjaan, pindah atau nomaden di perkotaan sehingga angka pengangguran lebih terlihat kuantitatifnya. Tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2015 di pedesaan sebesar 1,74 persen jika dibandingkan dengan pada Agustus 2014 sebesar 2,17 persen mengalami penurunan 0,43 poin. Hal ini kemungkinan disebabkan karena penduduk dipedesaan tidak terlalu selektif dalam memilih suatu pekerjaan, sehingga akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga, pekerja bebas ataupun bekerja sebagai petani dengan memaksimalkan lahan yang tersedia dan sebagian masih bertahan dipedesaan dengan berusaha mencari pekerjaan dengan cara melaju ke perkotaan, apalagi

dengan kemudahan akses transportasi dan semakin baiknya kondisi infrastruktur fasilitas seperti jalan raya. Tingkat Pengangguran terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2015 menurut jenis kelamin laki-laki sebesar 3,89 persen masih lebih tinggi jika dibandingkan perempuan sebesar 2,53 persen, karena laki-laki sebagai kepala keluarga khususnya di usia angkatan kerja lebih produktif dalam upaya mendapatkan status bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diharapkan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di daerah tersebut, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu wilayah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada wilayah tersebut, karena dengan angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Berikut ini disajikan data PDRB menurut lapangan usaha ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) serta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011-2015:



Sumber: BPS Provinsi DIY

#### GAMBAR 1. 1

PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) serta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2015

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2011-2015 dengan melihat presentase pertumbuhannya cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan PDRB yang paling tinggi yakni sebesar 5,47 persen sementara itu pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 2015 dengan presentase sebesar 4,94 persen.

Namun kenyataannya pertumbuhan PDRB yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru ternyata masih terbatas dalam penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran masih cenderung meningkat. Perhatian pemerintah terhadap nasib pekerja sebenarnya bukan hal yang baru, banyak kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk perbaikan nasib pekerja, antara lain K3, Jamsostek dan upah minimum. Namun pada kenyataannya pelaksanaan peraturan ini banyak mengalami hambatan baik ketidakperdulian

maupun ketidakmampuan pengusaha, hal ini terbukti dari banyaknya kasus pemogokan buruh yang menuntut haknya.

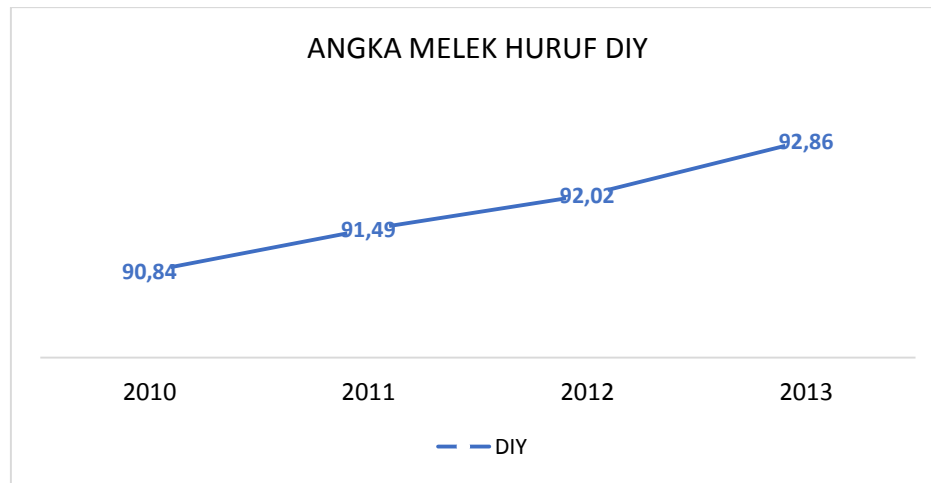
Jumlah tingkat pengangguran serta angkatan kerja menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika proses pembangunan harus mampu melibatkan seluruh angkatan kerja mak dari itu jumlah angkatan kerja yang besar itu dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Di era sekarang ini, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja serta mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan kerja dan produktivitas dalam bekerja karena program akhir pendidikan adalah teraihnya pekerjaan yang kita harapkan.

Dalam UUD 1945 pasal 28C yang telah diamandemen disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” . Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa besarnya porsi anggaran pendidikan adalah 20 persen dari total APBN. Ini mengimplikasikan bahwa komitmen bangsa ini untuk menempatkan pendidikan sebagai salah satu komponen sumber daya pengetahuan, sehingga dipahami bahwa pengetahuan akan menjadi pembangkit kemajuan ekonomi. (BPS,2012).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran dengan asumsi tersedianya lapangan kerja yang formal. Karena pada umumnya bekerja di bidang perkotaan atau pekerjaan yang bergengsi

membutuhkan orang-orang atau tenaga kerja berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien.



Sumber: *BPS Provinsi DIY*

### **GAMBAR 1. 2**

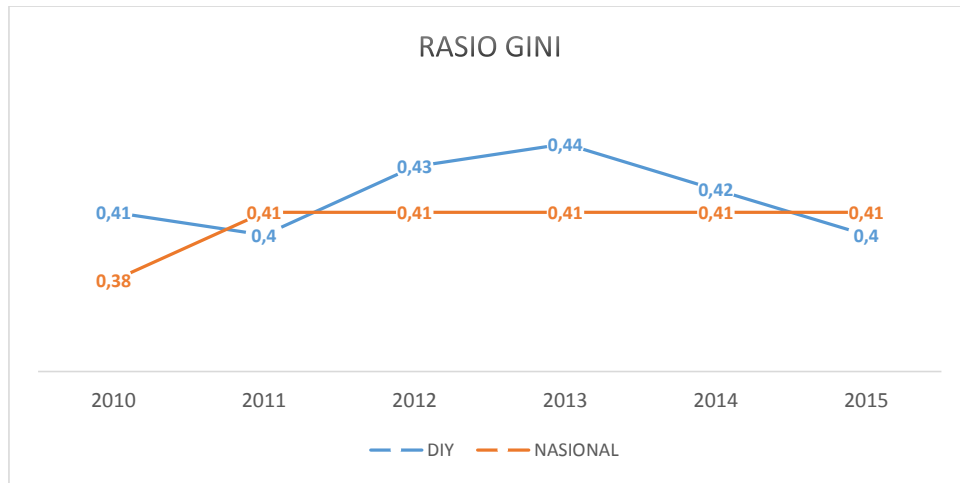
Perkembangan AMH Penduduk Yogyakarta Tahun 2010-2013

Salah satu indikator pendidikan dapat kita lihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan AMH penduduk Yogyakarta tahun 2010-2013 mencerminkan kecenderungan meningkat. Dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka sebesar 92,86 persen, artinya 92,86 persen proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas telah mampu dan mengerti baca-tulis.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Maka disini peran pemerintah diperlukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan distribusi pendapatannya pun juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.



Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk biasanya sering diukur dengan menggunakan indikator Rasio Gini. Berikut ini disajikan data Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015.



Sumber : BPS Provinsi DIY

**Gambar 1.3**  
Perkembangan Rasio Gini DIY dan Nasional

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa Rasio Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Ketimpangan pendapatan paling tinggi antara tahun 2010-2015 terjadi pada tahun 2013 dengan rasio sebesar 0,44 namun masih dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Namun secara umum rasio gini nasional dengan rasio gini Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan masih relatif tinggi. Artinya ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi daripada ketimpangan yang dihitung secara nasional.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa dan lainnya. Sektor yang paling potensial dikembangkan yaitu pariwisata, perdagangan dan usaha kecil menengah. Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi problematika sosial yang cukup serius

karena karakter pengangguran di daerah tersebut menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.

Masalah pengangguran penting untuk dianalisa karena pengangguran ini akan menimbulkan gejala sosial politik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu daerah bahkan suatu negara. Pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena orang yang menganggur berarti tidak berpenghasilan dan bekerja tidak penuh. Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan terhadap pengangguran telah banyak dilakukan, namun penelitian ini tetap penting dilakukan karena pengangguran perlu diperhatikan mengingat dampaknya yang sangat luas bagi perekonomian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan berbagai gambaran di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai keadaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul sebagai berikut: **Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan oleh penulis agar penelitian ini tetap terarah dan terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada, tingkat pendidikan yang dapat dilihat dari angka melek huruf (AMH) penduduk yang berusia 15 tahun keatas, laju pertumbuhan ekonomi serta rasio gini setiap kabupaten atau kota terhadap tingkat penganggutan terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Masalah pengangguran yang tentunya masih menjadi masalah utama dalam perekonomian suatu daerah di Indonesia termasuk Yogyakarta. Pemerintah telah berupaya serta memberikan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dikaitkan dengan kondisi Kabupaten atau Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana sifat dan signifikansi variabel pendidikan, laju pertumbuhan ekonomi dan rasio gini terhadap pengangguran di Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian peneliti mencoba melihat:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015
3. Bagaimana pengaruh rasio gini terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah variabel pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.
2. Untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.
3. Untuk mengetahui apakah variabel rasio gini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait Provinsi DIY**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ataupun masukan terhadap pemerintah serta bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi pengangguran di Yogyakarta.

### **2. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama proses kuliah yang nantinya digunakan sebagai bekal terjun ke masyarakat.

### **3. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan ataupun sumber referensi bagi pembaca dan memberikan informasi tentang pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dapat digunakan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian yang sejenis.

### **4. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang keadaan tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.